



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMAN TONI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 490424

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 894.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1241 m2/144 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 394.000.000
2. Tanah Seluas 1052 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 19217 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 107.000.000
4. Tanah Seluas 13918 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 77.000.000
5. Tanah Seluas 18418 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 102.000.000
6. Tanah Seluas 16956 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 94.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 54.400.000

1. MOBIL, MITSUBISHI ETERNA GTI DOHC Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 5 TP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 5.900.000
3. MOTOR, YAMAHA 28 D (MIO/AL115S)A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA NC12AF2CBI A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 201.360.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	266.935.532
F. HARTA LAINNYA	Rp.	32.647.402
Sub Total	Rp.	1.449.342.934
III. HUTANG	Rp.	86.752.599
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.362.590.335

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.